

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan rencana strategik adalah langkah awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika konteks dalam suatu organisasi telah terbentuk kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan dengan baik langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja akan memberikan makna pada visi, misi dan strategi jika hasil (*outcome*) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikuantifikasi guna menetapkan harapan yang terukur (*measurable expectation*). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah. Selain indikator kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang tepat. Ketidak tepatan data yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD diperlukan penetapan indikator kinerja yang akan dipergunakan dalam pengukuran capaian kinerja secara periodek dan sebagai cerminan efektivitas sasaran dan program serta anggaran yang dilaksanakan setiap tahun.

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1.	Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan	1.	Rasio panjang jaringan jalan baik
		2.	Rasio Panjang drainase dalam kondisi baik
		3.	Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah
2.	Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas	4.	Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah
		5.	Rasio kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman
3.	Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan	6.	Peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang
		7.	Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas
4.	Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH	8.	Rasio ketaatan terhadap RTRW
		9.	Rasio RTH terhadap luas wilayah
		10.	Penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku & S. Asam
5	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan LH dan Persampahan yang baik dan berkelanjutan	11.	Cakupan penanganan sampah
6.	Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian	12.	Jumlah Koperasi aktif
		13.	Jumlah UMKM dan IKM mandiri
		14.	Realisasi investasi

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
7.	Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional	15.	Rasio peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar-pasar milik pemerintah
8.	Terciptanya ruang representatif bagi PKL	16.	Rasio PKL yang tertata
9.	Terwujudnya peningkatan IKM yang mampu mengakses Pasar	17.	Cakupan bina perdagangan / usaha informal
		18.	Pertumbuhan industri
10.	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan Merata	19.	Angka Partisipasi Sekolah pada usia sekolah
		20.	Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS)
		21.	Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi
		22.	Jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan
11.	Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua	23.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
		24.	Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam
12.	Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama	25.	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan
13.	Terciptanya lapangan pekerjaan	26.	Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap
14.	Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing	27.	Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM
15.	Terkendalnya angka kelahiran penduduk	28.	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB
16.	Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan	29.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan
		30.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
		31.	Kelurahan layak anak



NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
17.	Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	32.	Indeks kepuasan masyarakat
18.	Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan	33.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
19.	Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas	34.	Rasio Jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian
20.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS	35.	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun
		36.	Persentase penduduk miskin
21.	Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga	37.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya
22.	Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata	38.	Terselenggaranya Event Berskala Nasional / Internasional